DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN HOLDING INVESTASI

Rapat Ke	:	40
Tahun Sidang	:	2025-2026
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat/ke-	:	Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-2
Dengan	:	DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Sifat Rapat	:	**Terbuka**
Hari, Tanggal	:	Selasa, 30 September 2025
Waktu	:	Pukul 15.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	:	**H. FAUZI AMRO, M.Si** (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Danis Maya (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara	:	Permohonan Audiensi dan dukungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026
Hadir	:	1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; 2. **H. NOPIANTO, S.Sos., M.M** (Wakil Ketua DPRD Fraksi Nasdem); dan 3. **H. M. ILYAS PANJI ALAM, S.H., S.E., M.M** (Wakil Ketua DPRD Fraksi PDI Perjuangan).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 274** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **15.34 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum

2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Tanggapan Komisi XI DPR RI Adalah sebagai berikut:

1. Penurunan nominal TKD bukan berarti penurunan dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Berdasarkan penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan dan hasil pembahasan Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, banyak alokasi belanja pusat yang diarahkan langsung ke daerah melalui program nasional, belanja kementerian/lembaga, serta berbagai skema pembiayaan lainnya yang menyentuh langsung masyarakat di daerah. Beberapa bentuk dukungan fiskal pusat yang tetap mengalir ke daerah di luar TKD antara lain:
   a) Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ditempatkan langsung di daerah mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Misalnya program ketahanan pangan dan infrastruktur irigasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
   b) Dana Desa, yang tetap dipertahankan pada kisaran Rp60,6 triliun secara nasional, dan menjadi sumber utama pembangunan di tingkat akar rumput.
   c) Belanja Non-TKD seperti subsidi energi, bantuan sosial, dan belanja modal nasional yang pelaksanaannya berada di daerah.
   d) Program strategis nasional dalam kerangka Asta Cita dan 8 Agenda Pembangunan tahun 2026, yang meliputi:
      1) Ketahanan pangan,
      2) Ketahanan energi,
      3) Pendidikan bermutu,
      4) Kesehatan berkualitas,
      5) Makan bergizi gratis,
      6) Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM,
      7) Pertahanan semesta,
      8) Akselerasi investasi dan perdagangan.

   Bila seluruh alokasi ini dijumlahkan, maka sesungguhnya arus fiskal pusat ke Daerah (tak terkecuali Sumatera Selatan) tetap besar dan signifikan. Pemerintah pusat berkomitmen memastikan pemerataan pembangunan dan layanan publik di daerah tidak terganggu oleh penyesuaian TKD.

2. Komisi XI DPR RI memahami kekhawatiran yang muncul di tingkat daerah terhadap potensi dampak penurunan TKD terhadap daya beli masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, forum ini kami pandang strategis untuk:
   - Menyelaraskan persepsi antara pusat dan daerah,
   - Menyampaikan aspirasi dan masukan dari DPRD Sumatera Selatan,
   - Serta mencari solusi sinergis agar fungsi fiskal daerah tetap kuat dan berdaya guna.
3. Komisi XI DPR RI akan terus mengawal alokasi fiskal ke daerah, memastikan prinsip keadilan dan efektivitas transfer, serta mendorong pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel dalam menjelaskan struktur belanja yang tersebar di berbagai instrumen.
4. Komisi XI DPR RI mengajak pemerintah daerah, khususnya DPRD Sumatera Selatan, untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), serta mengoptimalkan pemanfaatan insentif fiskal berbasis kinerja.
5. Komisi XI DPR RI siap memfasilitasi jika DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Daerah lainnya untuk bisa berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan jika Daerah atau DPRD Provinsi ataupun Kabupaten/Kota ingin berkoordinasi langsung dengan kementerian keuangan.
6. Komisi XI DPR RI mendorong agar melalui audiensi hari ini dapat menghasilkan pemahaman yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta komitmen bersama dalam memastikan bahwa pembangunan daerah tidak terhambat oleh penyesuaian kebijakan fiskal pusat.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditutup pada pukul **16.32 WIB**.

Jakarta, 30 September 2025

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,

H. FAUZI AMRO, M.Si